



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-41.KP.03.04 TAHUN 2021

TENTANG

PENYESUAIAN//*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan surat Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 1381/D.3/01/2021, tanggal 25 Januari 2021 dan Nomor 17451/D.3/12/2020, tanggal 10 Desember 2020, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan direkomendasikan dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui mekanisme penyesuaian//*inpassing*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyesuaian//*Inpassing* Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2016 tentang tunjangan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian//*Inpassing*;
6. Peraturan bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing*, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, disesuaikan/*inpassing* dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 April 2021

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN



SUTRISNO  
NIP. 196210151985031002

Tembusan :

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah u.p. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
10. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : SEK.2-41.KP.03.04 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 01 April 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	RAMLI, S.H., M.H. NIP. 198001092000031001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	359
2.	PATHONI, S.Kom. NIP. 197904062006041001	Penata Tk.I (III/d)	Penyusun Rencana Kerja Dan Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten	332
3.	SASTYO AJI DARMAWAN, S.H., M.E. NIP. 198612032006041001	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	200
4.	ASHA DIAH ISNIATY, S.Sos. NIP. 198409242009122006	Penata (III/c)	Penyusun Rencana Kerja Dan Anggaran pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	237
5.	ERWIN WIDAYAT, S.E. NIP. 198007202010121001	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Program Dan Pelaporan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan	214
6.	FANIS NOVIANI, S.Pt., M.Si. NIP. 198711032012122002	Penata (III/c)	Analisis Pertimbangan Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	200
7.	NANANG KRISTIAWAN, S.E. NIP. 197707282003121002	Penata Tk.I (III/d)	Analisis Pengaduan Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	380



1	2	3	4	5	6
8.	BUDIANSYAH, S.H., M.H. NIP. 198010282000031002	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Subseksi Keuangan Dan Perlengkapan pada Rumah Tahanan Kelas I Labuhan Deli	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara	300
9.	I GEDE AGUS WIDIASTRAWAN NIP. 198311042001121001	Penata (III/c)	Pengolah Bahan Evaluasi dan Pelaporan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali	261
10.	ASRULI, S.H. NIP. 197309302002121001	Penata (III/c)	Kepala Subseksi Administrasi Dan Pemeliharaan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara	237
11.	MADYANINGSIH, S.E., M.Acc. NIP. 197608232010122001	Penata (III/c)	Penyusun Laporan Dan Hasil Evaluasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta	214
12.	YAYAT P.L YUSUF, S.E. NIP. 198309282010121002	Penata (III/c)	Penyusun Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo	214
13.	KUSRIYADI, S.Pd., M.M. NIP. 198409142007031001	Penata (III/c)	Kepala Urusan Keuangan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makasar	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	200
14.	LA DARIANI, S.H. NIP. 198012312003121001	Penata (III/c)	Penyusun Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara	200
15.	LISDA, A.Md.Kep., S.H., M.H NIP. 198408112005012001	Penata (III/c)	Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah	200

1	2	3	4	5	6
16.	YEFRISON LANTO MAWO PADJAMU, S.H. NIP. 198504302006041001	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Program dan Pelaporan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah	200
17.	RISA YULIANDI NIP. 198407302009011004	Penata (III/c)	Pengevaluasi Pelaksana Kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat	200
18.	WAHYUDI, S.H. NIP. 198406142006041001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengolah Data Laporan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	150
19.	MAULVI NAZIR AHMAD, S.E. NIP. 198407192009121003	Penata Muda (III/a)	Penyusun Program pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat	118
20.	DEWA NYOMAN SIDAYATRA , S.P. NIP. 198205022007031002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali	178
					21. . . .

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
21.	WIDYO SANDHI SUPRAPTO, A.Md.Im.,S.E.,M.M. NIP. 198307102002121002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengelola data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur	155
22.	EMIEL AMARULLA, S.E. NIP. 198810072010121005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Keimigrasian Pertama pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten	150
23.	FAISAL, S.H. NIP. 197802012002121001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara	150



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN



SUTRISNO  
NIP. 196210151985031002